

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN BENCANA TANAH LONGSOR DI KECAMATAN PARONGPONG KABUPATEN BANDUNG BARAT

Muhammad Ibnu Fadillah¹⁾, Dahly Sukmapryandhika²⁾, Yamardi³⁾
 1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
 Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan metode eksplanatif dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur variabel bebas dengan variabel terikat melalui dimensi-dimensi yang kemudian dijabarkan melalui indikator-indikator yang dapat diukur secara kuantitatif sehingga dapat digunakan model uji hipotesis. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 144 terdiri dari 100 masyarakat Kecamatan Parongpong dan 44 Aparatur Kecamatan Parongpong dan Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini berkaitan dengan pengukuran pengaruh sehingga dilakukan pengukuran dengan menggunakan Regresi Linear Sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah (variabel X) memperoleh hasil 84,58% yang berada dalam kategori sangat baik, sedangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor (variabel Y) memperoleh hasil 86,37% berada dalam kategori sangat baik. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Barat terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat menerima hipotesis alternatif dengan didapatkannya pengujian secara parsial melalui t hitung $>$ t tabel ($11,054 > 1.976$). Artinya terdapat pengaruh dari Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Longsor.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Partisipasi Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Tanah Longsor

Abstract

The research is aimed at finding out how much influence the implementation of local government policies has on community participation in landslide disaster management in Parongpong District, West Bandung Regency. This study uses an explanatory method with a quantitative approach to measure independent variables with dependent variables through dimensions which are then described through indicators that can be measured quantitatively so that a hypothesis test model can be

used. This study used a sample of 144 consisting of 100 people in Parongpong District and 44 Parongpong District Apparatus and Apparatus of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of West Bandung Regency. This study is related to the measurement of influence so that measurements were carried out using Simple Linear Regression. The results of the study showed that the Implementation of Local Government Policies (variable X) obtained a result of 84.58% which is in the very good category, while Community Participation in Landslide Disaster Management (variable Y) obtained a result of 86.37% which is in the very good category. Then the results of the study showed that the influence of the Implementation of the West Regional Government Policy on Community Participation in Landslide Disaster Management in Parongpong District, West Bandung Regency accepted the alternative hypothesis ($H_a: \rho \neq 0$) by obtaining partial testing through $t_{count} > t_{table}$ ($11.054 > 1.976$). This means that there is an influence of the Implementation of Regional Government Policy on Community Participation in Landslide Disaster Management.

Keywords: Policy Implementation, Community Participation, Disaster Management, Landslide

PENDAHULUAN

Kabupaten Bandung Barat diidentifikasi sebagai daerah rawan bencana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah. Mengacu pada kondisi geografis, klimatologis, hidrologis, sosiologis, serta potensi sumber daya alamnya, Kabupaten Bandung Barat ditandai oleh lima jenis ekoregion, yaitu Pegunungan Vulkanik, Pegunungan Struktural, Dataran Vulkanik, Dataran Fluvial, dan Perbukitan Vulkanik. Dilihat dari kelas – kelas tersebut bahwa Kabupaten Bandung Barat berpotensi terjadi bencana, seperti tanah longsor, cuaca ekstrim, banjir, dan gempa bumi. Risiko bencana yang ada berpotensi menyebabkan berbagai kerugian dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan jika tidak dihadapi dengan kesiapsiagaan yang baik. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANGDA), sebagian wilayah Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh lereng dengan kemiringan lebih dari 40%, menunjukkan bahwa banyak daerah di Kabupaten Bandung Barat adalah berlembah dan berbukit dengan tingkat kecuraman tinggi dan curah hujan tahunan antara 2000 hingga 3000 mm. Dengan kombinasi tingginya curah hujan dan terjalnya lereng, sebagian wilayah Kabupaten Bandung Barat sangat rentan terhadap bencana, seperti tanah longsor. Risiko tinggi terhadap tanah longsor di daerah ini disebabkan oleh kerentanan terhadap pergerakan tanah, yang semakin meningkat jika

ada aktivitas manusia yang merusak keseimbangan lereng. Total luas area yang berisiko terkena tanah longsor adalah 67.920 hektar, angka ini didapatkan dari penjumlahan luas bahaya di semua wilayah yang terdampak.

Wilayah kecamatan di Kabupaten Bandung Barat yang berpotensi tinggi terjadi bencana tanah longsor adalah Kecamatan Parongpong karena terletak pada daerah dengan kemiringan lereng. Dalam beberapa bulan terakhir, bencana longsor ini kerap terjadi di daerah tersebut, seperti yang terjadi di Kampung Hui, RT01/03 Desa Cigugurgirang, Kampung Tutugan RT02/06 Desa Cihanjuang Rahayu, Kampung Manglayang RT02/02 Desa Cihanjuang Rahayu, dan Kampung Cicarita RT04/19 Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong. Dalam beberapa bulan terakhir, bencana longsor ini kerap terjadi di daerah tersebut, seperti yang terjadi di Kampung Hui, RT01/03 Desa Cigugurgirang, Kampung Tutugan RT02/06 Desa Cihanjuang Rahayu, Kampung Manglayang RT02/02 Desa Cihanjuang Rahayu, dan Kampung Cicarita RT04/19 Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong.

Penanggulangan bencana tanah longsor dapat diidentifikasi melalui sejumlah faktor struktural dan fungsional yang memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Salah satu masalah utama adalah adanya ketidaksesuaian antara perencanaan kebijakan dengan kondisi lapangan, yang sering kali disebabkan oleh keterbatasan data dan kurangnya pemetaan risiko. Selain itu, anggaran dan sumber daya manusia serta peran serta masyarakat dalam pengurangan risiko bencana masih cenderung rendah. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana tanah longsor memerlukan integrasi yang lebih baik antara aspek regulasi, alokasi sumber daya, serta partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait.

Partisipasi dan kontribusi pihak di luar pemerintah merupakan sebuah inisiatif yang perlu dibangun untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam penerapan kebijakan ini mengingat masyarakat setempatlah yang lebih mengetahui berbagai permasalahan dan potensi sumber daya yang ada. Oleh karena itu, masyarakat perlu diikutsertakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan dalam proses penanggulangan bencana tersebut. Hasil kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana tanah longsor di Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Hasil Kajian Kesiapsiagaan di Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat

JENIS BAHAY A	PK B	PT D	PK M	KMD P	PM	INDEKS KESIAPSIAGA AN	LEVEL KESIAPSIAGA AN
Tanah Longsor	0,0 9	0,0 2	0,0 1	0,03	0,0 1	0,3	RENDAH
Indeks Multi Bahaya	0,0 9	0,0 2	0,0 1	0,03	0,0 1	0,3	RENDAH

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017-2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa indeks kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana tanah longsor di Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat berada pada kelas rendah dengan indeks 0,03. Selain itu, pada aspek partisipasi masyarakat pun hanya memiliki nilai 0,01 yang mencerminkan bahwa partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana ini masih rendah. Kemauan masyarakat untuk mendukung pembangunan hanya yang direncanakan dan ditetapkan oleh pemerintah, sehingga masyarakat bersifat pasif dan hanya sebagai subordinasi pemerintah.

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam penerapan kebijakan ini mengingat masyarakat setempatlah yang lebih mengetahui berbagai permasalahan dan potensi sumber daya yang ada. Oleh karena itu, masyarakat perlu diikutsertakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam proses penanggulangan bencana tersebut.

Optimalisasi upaya penanggulangan bencana tanah longsor di Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat harus menjadi fokus

utama dalam penanggulangan bencana. Adanya dasar hukum yang kuat, perencanaan penanggulangan bencana dapat diintegrasikan dan dijadikan sebagai payung hukum untuk mengajak keterlibatan para pemangku kepentingan di luar pemerintahan untuk berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung Barat. Masyarakat sebagai penerima dampak dari bencana tersebut diharapkan terlibat secara fungsional dalam upaya pengurangan risiko bencana yang berpotensi di Kabupaten Bandung Barat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian eksplanatif (penjelasan) dengan pendekatan kuantitatif seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2022), bahwa “Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

Populasi dalam studi ini mencakup seluruh wilayah administratif Kecamatan Parongpong di Kabupaten Bandung Barat. Kecamatan Parongpong memiliki luas area sebesar 47,43 km². Wilayah ini terbagi menjadi 7 desa, yaitu: Desa Ciwaruga, Desa Cihideung, Desa Cigugurgirang, Desa Sariwangi, Desa Cihanjuang, Desa Cihanjuang Rahayu, dan Desa Karyawangi. Populasi manusia dalam penelitian ini yaitu seluruh masyarakat Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat yang terhitung sebanyak 104.705 orang yang terbagi menjadi 120 RW, 442 RT, dan 37.341 Kepala Keluarga (KK). Selain itu, dalam penelitian ini juga terdapat pihak aparatur pemerintahan diantaranya, Aparatur Pemerintahan Kecamatan Parongpong sebanyak 32 orang dan Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebanyak 48 orang.

Pengumpulan data menggunakan instrumen kuesioner tertutup dengan skala Likert 5 pilihan jawaban yang disebarakan kepada 144 responden dengan metode *Multistage Random Sampling* dimana populasi yang berada di

daerah besar dibagi dalam beberapa area yang lebih kecil dan jelas batas-batasnya. Dalam praktek sampling ini digunakan untuk mengurangi biaya, karena yang menjadi objek adalah daerah administrasi yang ada (kecamatan, kelurahan, RW, RT dan sebagainya) agar dapat dengan mudah memperoleh sampling frame. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif lalu data dianalisis dengan uji koefisien determinasi dan uji hipotesis parsial (Uji T). Hal ini bertujuan untuk mengukur tanggapan responden terkait implementasi kebijakan pemerintah daerah dan tingkat partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana tanah longsor.

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Daerah (Variabel X)

Berdasarkan upaya penanggulangan bencana dengan baik sesuai kebijakan Pemerintah Daerah Nomor 3 Tahun 2013 oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Bandung Barat, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III (dalam Widodo 2022:96-110). terdapat empat variabel yang menjadi penentu keberhasilan implementasi kebijakan publik diantaranya adalah Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Berdasarkan data hasil rekapitulasi jawaban responden pada variabel Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah yang diukur dalam 9 item pernyataan terdapat penilaian indikator dengan nilai rata – rata terkecil 77,92% dan terbesar 89,86% sehingga persentase skor rata – rata yang diperoleh yaitu 84,58% dengan hasil sangat baik. Indikator dengan nilai terkecil terdapat pada tanggapan responden mengenai alokasi sumber daya anggaran dalam penanggulangan bencana tanah longsor. Indikator dengan nilai terbesar terdapat pada tanggapan responden mengenai masyarakat sebagai pelaksana kebijakan sudah melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana tanah longsor dengan baik. Adapun Analisa peneliti tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah sudah terlaksana dengan baik, karena hamper seluruh indikator bernilai sangat baik, namun masih perlu adanya peningkatan dalam pelaksanaan kebijakan, terutama mengenai alokasi anggaran.

Partisipasi Masyarakat (Variabel Y)

Dalam mewujudkan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat ini diperlukan adanya partisipasi masyarakat secara aktif. Oleh karena itu, Peneliti menggunakan teori partisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uphoff (dalam Soetomo, 2008:12) mengelompokkan partisipasi masyarakat menjadi 4 (empat) tingkatan, yaitu: Partisipasi pada Tahap Perencanaan, Partisipasi pada Tahap Pelaksanaan, Partisipasi pada Tahap Pemanfaatan, dan Partisipasi pada Tahap Evaluasi.

Berdasarkan data hasil rekapitulasi jawaban responden pada variabel Partisipasi Masyarakat yang diukur dalam 8 item pernyataan terdapat penilaian indikator dengan nilai rata – rata terkecil 78,47% dan terbesar 91,39% sehingga dengan persentase skor rata – rata yang diperoleh yaitu 86,37% dengan hasil sangat baik. Indikator dengan nilai terkecil terdapat pada tanggapan responden mengenai masyarakat dapat bertanggungjawab dengan baik terhadap hasil dari kebijakan tentang penanggulangan bencana tanah longsor. Indikator dengan nilai terbesar terdapat pada tanggapan responden mengenai masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam penerapan kebijakan tentang penanggulangan bencana tanah longsor. Adapun Analisa peneliti tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor sudah terlaksana dengan baik, karena hamper seluruh indikator bernilai sangat baik.

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Tabel Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16.726	1.618		10.338	.000
	Implementasi Kebijakan	.468	.042	.680	11.054	.000

a. Dependent Variable: Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, diketahui konstanta sebesar 16,726 nilai koefisien regresi dari variabel X sebesar 0,468. Hasil tersebut membentuk persamaan regresi sebagai berikut :

Model Persamaan :

$$Y = 16,726 + 0,468X$$

Interpretasi persamaan regresi linear sederhana di atas adalah sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 16,726 artinya jika Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Oleh Pemerintah Kecamatan Parongpong dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat bernilai 0, maka Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor akan bernilai 16,726
2. Nilai koefisien regresi variabel X (Implementasi Kebijakan) adalah sebesar 0,468. Hasil ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Oleh Pemerintah Kecamatan Parongpong dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat bernilai positif yang artinya terjadi hubungan positif antara Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Oleh Pemerintah Kecamatan Parongpong dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor, yaitu semakin baik implementasi kebijakan, maka partisipasi masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Analisis Korelasi bertujuan untuk melihat sejauh mana tingkat hubungan yang terjadi antara variabel bebas dengan variabel terikat. Menurut Riyanto dan Hatmawan (2020), “uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa baik kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen”.

Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.680 ^a	.463	.459	1.632
a. Predictors: (Constant), Implementasi Kebijakan				

Berdasarkan tabel dan perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi pada tabel 4.32, maka variabel X (Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah) memberikan pengaruh sebesar 46,3% terhadap variabel Y (Partisipasi Masyarakat). Artinya pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat sebesar 46,3% dan sisanya 53,7% dipengaruhi oleh variabel – variabel lain yang tidak diteliti.

Hasil Uji Hipotesis (Uji T)

Uji t adalah pengujian secara statistic untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh suatu variabel independent secara individual dalam menjelaskan variabel dependen. Prosedur pengujiannya adalah setelah melakukan perhitungan terhadap t hitung dengan t tabel. Nilai t hitung dibandingkan dengan t tabel dengan menggunakan $(df) = n - k - 1$ dan tingkat signifikansi 0,05. Kriteria pengambilan keputusan yaitu:

1. Jika nilai t hitung $\leq t$ table maka H_a ditolak, artinya tidak ada pengaruh signifikan
2. Jika nilai t hitung $> t$ table maka H_a diterima dan H_o ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan

Tabel Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Coefficients^a				
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
	B	Std. Error	Beta	

1	(Constant)	16.726	1.618		10.338	.000
	Implementasi Kebijakan	.468	.042	.680	11.054	.000
a. Dependent Variable: Partisipasi Masyarakat						

Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat dilihat bahwa t hitung untuk variabel Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah sebesar $11,054 > 1,976$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang berarti t hitung $> t$ tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya implementasi kebijakan pemerintah daerah berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana longsor di Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian mengenai Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Barat terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Oleh Pemerintah Kecamatan Parongpong dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat termasuk dalam kategori sangat baik yaitu 84,58% karena berada dalam rentang 81%-100%. Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sudah dijalankan dengan sangat baik. Selanjutnya Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat termasuk dalam kategori sangat baik yaitu 86,37% karena berada dalam rentang 81%-100%. Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sudah dijalankan dengan sangat baik. Adapun Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa R Square sebesar 0,463 atau dalam perhitungan persentase sebesar 46,3%. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel X (Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah) memberikan pengaruh sebesar 46,3% terhadap variabel Y (Partisipasi Masyarakat). Sedangkan Hasil t hitung untuk variabel Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah sebesar $11,054 > 1,976$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang berarti t hitung $> t$ tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya implementasi kebijakan pemerintah daerah berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana longsor di Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Riyanto, S., & Hatmawan, A. A., 2020. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*. Yogyakarta: Deepublish.

Sugiyono, 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Soetomo, 2008. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Widodo, Joko. (2022). *Analisis Kebijakan Publik*. Media Nusa Creative: Malang

DOKUMEN :

Dokumen Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) “Profil Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016”

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana

Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017-2021

Dokumen Profil Kecamatan Parongpong

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat 2018-2022